

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan imigrasi Amerika Serikat telah menjadi isu yang kompleks dan penuh dinamika sepanjang sejarah negara tersebut. Namun, pada masa kepemimpinan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (2017-2021), terjadi perubahan kebijakan luar negeri yang signifikan terkait dengan penanganan migran ilegal. Perubahan tersebut menandai transformasi pendekatan kebijakan imigrasi yang lebih ketat dan restriktif dibandingkan dengan kebijakan presiden sebelumnya.

Amerika Serikat sebagai negara tujuan utama imigran global telah mengalami berbagai perubahan kebijakan imigrasi yang signifikan sepanjang sejarahnya. Kebijakan imigrasi Amerika Serikat tidak hanya mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi domestik, tetapi juga berdampak pada hubungan internasional dan stabilitas regional, khususnya di kawasan Amerika Latin. Dalam konteks ini, masa kepemimpinan Donald Trump yang berlangsung dalam dua periode (2017-2021 dan 2025-sekarang) menandai era transformasi fundamental dalam pendekatan Amerika Serikat terhadap isu imigrasi.

Periode kepemimpinan Trump yang pertama (2017-2021) ditandai dengan implementasi kebijakan imigrasi yang sangat restriktif dan kontroversial. Pemerintahan Trump menerapkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk membatasi imigrasi legal maupun ilegal, termasuk pembangunan tembok perbatasan dengan Meksiko, kebijakan "*Remain in Mexico*" atau *Migrant Protection Protocols (MPP)*, dan pembatasan program reunifikasi keluarga

(Nowrasteh, 2021). Kebijakan-kebijakan ini mencerminkan pendekatan "*America First*" yang memprioritaskan kepentingan warga negara Amerika Serikat dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing.

Terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2024 untuk periode kedua (2025-2029) menimbulkan spekulasi dan analisis mendalam mengenai keberlanjutan dan modifikasi kebijakan imigrasi yang telah diimplementasikan sebelumnya. Periode transisi dari kepemimpinan Biden (2021-2025) yang relatif lebih liberal dalam kebijakan imigrasi kembali ke tangan Trump menghadirkan dinamika politik dan sosial yang kompleks, terutama dalam konteks penanganan krisis kemanusiaan di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko.

El Paso, Texas, merupakan salah satu titik perbatasan yang paling strategis dan kompleks dalam konteks imigrasi Amerika Serikat. Kota ini berbatasan langsung dengan Ciudad Juárez, Meksiko, dan menjadi salah satu jalur utama bagi migran dari Amerika Tengah dan Selatan yang berusaha memasuki Amerika Serikat. Menurut data U.S. Customs and Border Protection, sektor El Paso mencatat lebih dari 200.000 penangkapan migran pada tahun fiskal 2023, menjadikannya salah satu sektor tersibuk di sepanjang perbatasan selatan Amerika Serikat (CBP, 2023). Kompleksitas situasi di El Paso tidak hanya terletak pada volume migran yang tinggi, tetapi juga pada karakteristik demografis dan sosial-ekonomi dari para migran tersebut. Mayoritas migran yang melalui El Paso berasal dari negara-negara Amerika Tengah seperti Honduras, Guatemala, dan El Salvador, yang mengalami krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang berkepanjangan. Selain itu, terdapat

peningkatan signifikan jumlah migran dari Venezuela, Kuba, dan Haiti yang mencari suaka politik di Amerika Serikat (Chishti & Bolter, 2022).

Perubahan kebijakan imigrasi Amerika Serikat pada era Trump pertama dan kedua tidak hanya mempengaruhi dinamika di tingkat domestik, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap hubungan bilateral Amerika Serikat-Meksiko, kerjasama regional di kawasan Amerika Utara, serta mempengaruhi norma-norma dan rezim internasional terkait penanganan pengungsi dan pencari suaka. Kebijakan-kebijakan tersebut juga memicu respon dari organisasi internasional seperti PBB, kelompok hak asasi manusia, dan aktor non-negara lainnya.

Pentingnya studi kasus El Paso Border dalam konteks ini terletak pada posisinya sebagai episentrum implementasi kebijakan-kebijakan migrasi era Trump. Perubahan kebijakan yang terjadi di daerah ini mencerminkan pergeseran pendekatan secara makro dari administrasi Trump terhadap masalah migrasi ilegal. Kota ini menjadi lokasi utama untuk penerapan kebijakan pemisahan keluarga, pembangunan dan penguatan infrastruktur perbatasan, serta pusat penahanan migran yang kontroversial.

Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mendorong perubahan kebijakan imigrasi Amerika Serikat terkait pada masa kepemimpinan Donald Trump periode pertama hingga kedua, dengan fokus khusus pada implementasi kebijakan tersebut di kawasan El Paso Border. Studi ini akan meninjau berbagai aspek perubahan kebijakan, termasuk dimensi keamanan nasional, politik domestik, dan implikasi diplomatik. Selain itu, penelitian ini juga akan

mengevaluasi dampak kebijakan tersebut terhadap dinamika migrasi regional dan hubungan bilateral AS-Meksiko.

Dengan memahami kebijakan imigrasi Amerika Serikat di era Trump, khususnya di wilayah El Paso Border, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap diskursus akademis mengenai politik migrasi, hubungan internasional, dan analisis kebijakan luar negeri. Studi ini juga dapat menjadi landasan untuk memahami konsekuensi jangka panjang dari kebijakan-kebijakan tersebut terhadap stabilitas keamanan global dan regional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas muncul pertanyaan :

1. Bagaimana kebijakan imigrasi Amerika Serikat pada masa Donald Trump periode pertama hingga kedua mempengaruhi stabilitas keamanan nasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang perubahan kebijakan luar negeri terkait migrasi dan studi keamanan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dan menambah pengetahuan tentang dampak dari perubahan kebijakan luar negeri yang mempengaruhi stabilitas keamanan negara .

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah memperdalam pengetahuan bagi akademika di bidang Hubungan Internasional mengenai perubahan kebijakan luar negeri dan mengenai studi keamanan pada wilayah perbatasan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah mampu menjadi bahan bacaan dan rujukan bagi berbagai pihak, seperti pihak pemerintah Indonesia terutama pada stakeholder kebijakan luar negeri dan imigrasi.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Terdapat penelitian yang ditulis oleh Romulia pada tahun 2020 dengan judul “Sekuritisasi imigran ilegal di perbatasan selatan Amerika Serikat oleh Presiden Donald Trump : perubahan kebijakan luar negeri”. Penelitian ini memfokuskan

pada kajian faktor-faktor kondisi internasional dan domestik yang dapat menjadi bahan pertimbangan oleh individu atau yang membuat keputusan dalam melakukan perubahan kebijakan luar negeri. Dalam penelitiannya, Romulia (2020) menggunakan salah satu pendekatan dari hubungan internasional yaitu *'The Politics of Foreign Policy Change'* yang dikemukakan oleh Jakob Gustavsson.

Lalu, terdapat penelitian lainnya yang ditulis oleh Sugiati pada tahun 2022 dengan “Analisa Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Imigran Ilegal Meksiko Dalam Isu Perbatasan Pada Tahun 2017-2019”. Penelitian ini sebagian besar berfokus pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat untuk para imigran ilegal. Sugiati menganggap bahwa dibawah kepemimpinan Donald Trump banyak sekali mengalami penolakan dan kritik dari masyarakat asli Amerika Serikat maupun respon dari negara negara internasional yang dalam hal ini kebijakan terkait imigran tidak sejalan dengan paham yang dimiliki oleh masyarakat Amerika Serikat yang menjunjung tinggi kebebasan. Pada penelitian ini, Sugiati (2022) menggunakan Teori Kepentingan Nasional dan Teori Keamanan Nasional.

Sementara pada penelitian yang ditulis oleh Sudagung, Amanda, dan Dewi pada tahun 2017 dengan judul “Sekuritisasi Donald Trump Terhadap Isu Migrasi dan Perbatasan”. Penelitian ini berisi kajian terhadap permasalahan keamanan global yang dihadapi oleh Amerika Serikat. Khususnya mengenai proses sekuritisasi yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump sejak beliau mengajukan diri sebagai calon presiden. Dalam penelitiannya, Sudagung, Amanda, dan Dewi

(2017) menggunakan pendekatan Copenhagen School dan Sekuritisasi yang dikemukakan oleh Barry Buzan.

Terdapat penelitian yang ditulis oleh Pierce, Bolter, dan Selee pada tahun 2018 dengan judul “US Immigration Policy Under Trump: Deep Changes and Lasting Impact”. Penelitian ini menganalisis perubahan kebijakan imigrasi yang signifikan dan berdampak jangka panjang yang terjadi di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

Penelitian ini akan berfokus pada dinamika kebijakan luar negeri imigrasi yang berdampak pada stabilitas keamanan nasional. Dampak dari kebijakan luar negeri ini tentu akan timbul dari berbagai aspek, mengingat Amerika Serikat merupakan negara adikuasa yang sangat berperan besar dalam isu-isu politik dan keamanan internasional. Jika pada penelitian-penelitian sebelumnya berfokus pada kebijakan luar negeri dan faktor yang mempengaruhinya, penelitian ini akan melengkapi penelitian sebelumnya dengan melihat dari sudut pandang keamanan nasional dan dampak terhadap stabilitas keamanan.

1.5.2 Teori Keamanan

Teori keamanan Barry Buzan, sebagaimana dikembangkan dalam karyanya yang monumental *"People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era"*, mewakili salah satu kontribusi teoretis paling komprehensif dalam bidang studi keamanan internasional. Barry Buzan berargumen bahwa konsep keamanan adalah cara yang serbaguna, menembus dan berguna untuk mendekati studi hubungan internasional. Keamanan menyediakan kerangka analitis antara ekstrem kekuatan dan perdamaian, menggabungkan

sebagian besar wawasan mereka dan menambahkan lebih banyak lagi miliknya sendiri. Dalam pandangan ini, faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan dari keamanan harus dipertimbangkan selain faktor politik dan militer. Teori Buzan menantang secara mendasar paradigma realisme tradisional yang telah lama mendominasi studi keamanan internasional, yang cenderung melihat keamanan semata-mata dari perspektif negara sebagai aktor utama dan mengutamakan kekuatan militer sebagai instrumen utama dalam menghadapi ancaman.

Fondasi epistemologis teori keamanan Buzan berangkat dari pemahaman bahwa keamanan adalah konsep yang *"essentially contested,"* yang berarti definisi dan interpretasinya dapat bervariasi tergantung pada konteks, perspektif, dan kepentingan aktor yang terlibat. Buzan mendefinisikan keamanan sebagai *"pursuit of freedom from threat and the ability of states and societies to maintain their independent identity and their functional integrity against forces of change which they see as hostile"* (Buzan, 1991: 18). Definisi ini menunjukkan bahwa keamanan tidak hanya terkait dengan kelangsungan hidup fisik, tetapi juga dengan pelestarian identitas dan integritas fungsional entitas yang dilindungi. Konseptualisasi ini memungkinkan pemahaman keamanan sebagai fenomena yang multifaset, di mana ancaman dapat muncul dari berbagai sumber dan memiliki berbagai manifestasi. Buzan menjelaskan bahwa *"Security is a self-referential practice, because it is in this practice that the issue becomes a security issue – not necessarily because a real existential threat exists but because the issue is presented as such a threat"* (Buzan et al., 1998: 24). Proses teori keamanan melibatkan tiga elemen kunci: aktor

sekuritisasi yang melakukan speech act, objek referensi yang harus dilindungi, dan audiens yang harus diyakinkan tentang keberadaan ancaman eksistensial.

1.5.3 Konsep Perubahan Orientasi Kebijakan Luar negeri

Konsep kebijakan luar negeri biasanya berkaitan dengan taktik, nilai, dan tujuan yang mengarahkan kontak dan hubungan suatu negara dengan negara lain dan entitas global. Hal ini mencakup berbagai topik, termasuk kepentingan ekonomi, keamanan nasional, diplomasi, dan kemajuan prinsip-prinsip moral. Kebijakan luar negeri mencakup berbagai macam maksud dan tujuan, seperti mempromosikan nilai dan prinsip, mengejar pengaruh global, kepentingan ekonomi, dan keamanan nasional. Latar belakang sejarah, kondisi geopolitik, dan dinamika politik internal suatu negara memengaruhi kebijakan luar negerinya. Hal ini memerlukan penerapan sejumlah strategi dan taktik, termasuk program soft power, ketatanegaraan ekonomi, penangkalan militer, dan diplomasi. Pejabat pemerintah dan pengambil keputusan memutuskan kebijakan luar negeri dengan mempertimbangkan sejumlah variabel, termasuk kepentingan nasional, konvensi internasional, kewajiban aliansi, dan opini publik di dalam negeri.

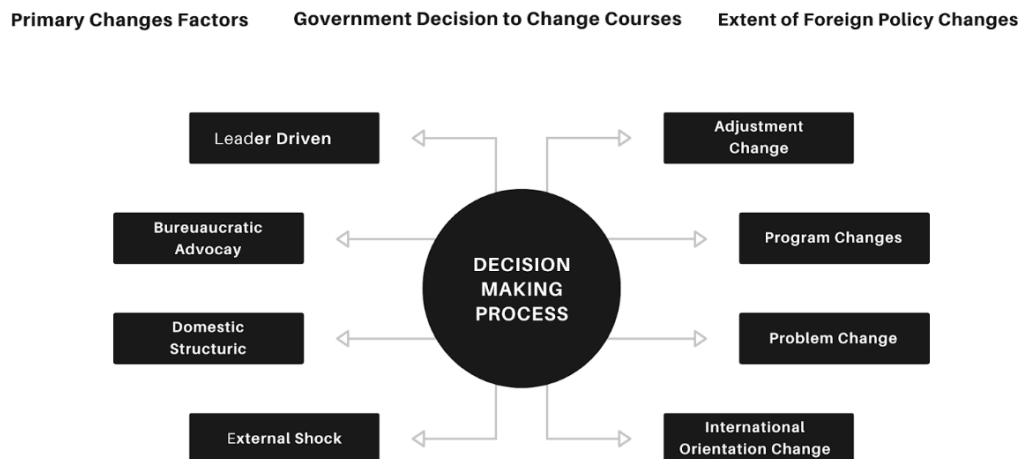
Kebijakan luar negeri menurut Hermann (1990), adalah sebuah program yang berorientasi pada tujuan atau masalah oleh pembuat kebijakan yang berwenang (atau perwakilannya) yang diarahkan kepada entitas di luar yurisdiksi politik pembuat kebijakan. Kebijakan luar negeri selalu mengalami perubahan dan modifikasi meski dalam skala kecil.

Hermann (1990), menjelaskan bahwa suatu negara dapat melakukan perubahan kebijakan luar negeri pada beberapa aspek, antara lain:

1. *Adjustment Change*, perubahan yang terjadi pada level usaha (semakin besar atau semakin kecil). Tujuan dan cara perubahan tidak berubah.
2. *Program Changes*, perubahan yang terjadi pada metode perubahan yang sedang dilakukan. Tujuan dari suatu kebijakan tetap, sedangkan cara melaluinya terdapat perubahan.
3. *Problem/Goal Change*, perubahan pada tujuan suatu kebijakan.
4. *International Orientation Change*, perubahan pada kebijakan ini termasuk dalam perubahan yang ekstrem. Perubahan ini terjadi pada kebijakan luar negeri terkait perubahan pada orientasi politik internasional.

Gambar 1.1

Bagan Ide Pokok Teori Hermann



Dengan demikian, konseptualisasi awal dari perubahan kebijakan luar negeri menyiratkan bahwa hal tersebut mencakup berbagai macam fakta faktual yang berbeda dalam tiga dimensi kualitatif. Pertama, hal ini dapat digunakan untuk

menggambarkan modifikasi tujuan kebijakan luar negeri, metode yang digunakan untuk mencapainya, atau keduanya. Kedua, terdapat rentang yang luas dalam hal seberapa besar sebuah negara mengubah kebijakan luar negerinya; negara tersebut dapat mengubah pendiriannya dalam satu isu kebijakan luar negeri, dalam satu sektor, atau dalam beberapa bidang sekaligus. Terakhir, pergeseran dalam kebijakan luar negeri dapat mewakili perubahan radikal dari perilaku sebelumnya atau hasil dari sedikit penyesuaian bertahap yang ditambahkan bersama-sama.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Konsep Linkage Theory

Rosenau menciptakan kerangka kerja konseptual untuk penelitian Perubahan Kebijakan Luar Negeri pada tahun 1970-an. Rosenau memperkenalkan "Linkage Theory," sebuah studi yang ketat tentang hukum internasional (Rosenau, 1971). Konsep linkage theory ini menggambarkan hubungan antara dua sistem suatu negara, yaitu sistem nasional dan internasional. Menurut James N. Rosenau, studi politik luar negeri digunakan untuk menganalisis dan menilai faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara terhadap negara lain. Agar terjadi keterkaitan timbal balik dalam Linkage Theory ini, kedua aktor harus meninggalkan taktik yang berlaku dan kriteria pengambilan keputusan berbasis maksimisasi yang normal. Di sisi lain, keterhubungan yang dipicu oleh ancaman hanya membutuhkan aktor yang terancam untuk mengubah perilakunya; keterhubungan yang dipaksakan, di sisi lain, mengharuskan inisiator untuk

meninggalkan proses pengambilan keputusan standar dan strategi yang berlaku untuk memaksa pihak lain mengubah arahnya.

Rosenau mengidentifikasi 5 sumber utama untuk perumusan kebijakan luar negeri

1. Sumber idiosinkratik, yang merupakan sumber internal yang meneliti pengalaman, bakat, dan kepribadian elit politik yang membentuk perilaku, penilaian, dan pendekatan mereka terhadap kebijakan luar negeri di negara yang mereka pimpin.
2. Sumber sistemik merujuk pada sumber-sumber yang berasal dari lingkungan eksternal, termasuk interaksi internasional, aliansi, dan area isu.
3. Sumber-sumber kemasyarakatan, atau sumber-sumber yang berasal dari lingkungan internal suatu negara, termasuk sejarah, budaya, dan keprihatinan lokal
4. Sumber internal yang menggambarkan akuntabilitas politik dan sistem pemerintahan, yaitu sumber-sumber pemerintahan dan birokrasi.
5. Sumber peran yang berasal dari posisi di dalam pemerintahan itu sendiri.

1.6.1.2 Konsep Perubahan Kebijakan Luar Negeri

Konsep perubahan kebijakan luar negeri dikemukakan oleh Charles F. Hermann (1990), yang mempelajari bagaimana para pemimpin memulai perubahan kebijakan luar negeri. Hermann mengidentifikasi empat tingkat perubahan kebijakan luar negeri berdasarkan tingkat penyesuaian dari kebijakan dan situasi yang ada.

1. Tingkat terendah adalah perubahan penyesuaian, yang melibatkan perubahan kecil pada kebijakan yang ada. Perubahan program merupakan

pendekatan atau fokus baru dalam bidang kebijakan luar negeri tertentu. Perubahan masalah/tujuan mencerminkan pergeseran yang signifikan dalam orientasi negara dengan mendefinisikan kembali tujuan dan masalah yang sedang ditangani.

2. Tingkat tertinggi adalah perubahan orientasi internasional, yang melibatkan transformasi lengkap dari serangkaian keyakinan dan pendekatan aktor terhadap urusan luar negeri. Kerangka kerja Hermann menyoroti bahwa perubahan kebijakan luar negeri dapat berkisar dari perubahan kecil hingga perombakan radikal, tergantung pada motivasi pemimpin dan besarnya perubahan dari status quo.

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Konsep Linkage Theory

Seperti yang dituliskan Rosenau ketika seorang aktor merasa ada sesuatu hal yang tidak adil dalam situasi dan mengancam posisinya, mereka tidak dapat menyelesaikan masalah dengan mengubah jalur tindakan mereka sendiri. Akibatnya, mereka menggunakan politik keterkaitan dalam upaya untuk membujuk aktor lain untuk mengubah arah tindakan mereka. Seperti pada kasus perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait migran, dimana Donald Trump membuat kebijakan yang kontroversial dan sangat menentang migran. Padahal pada kenyataannya kebijakan Trump ini lah yang sangat menyelamatkan Amerika Serikat dari pertumbuhan jumlah penduduk dan kriminalitas yang tinggi terutama pada wilayah El Paso Texas. Mengingat dalam Sebaliknya kebijakan Joe Biden yang membuka lebar pintu ke Amerika Serikat untuk migran menjadi ancaman yang

cukup besar nantinya seperti banyaknya gelandangan yang tidak memiliki tempat tinggal seperti pada kasus tahun 2020.

1.6.2.2 Konsep Perubahakan Kebijakan Luar Negeri

Setiap negara tentu akan mengalami perubahan kebijakan seiring bergantinya pemimpin. Hal itu juga terjadi pada Amerika Serikat terutama pada pergantian presiden Donald Trump ke Joe Biden. Menyoroti perihal perubahan kebijakan luar negeri terkait migran, pada studi kasus penelitian ini yaitu pada kawasan El Paso Border menjadi korban dari perubahan kebijakan luar negeri yang ekstrem di Amerika Serikat. Seperti yang dijelaskan oleh Hermann (1990) pada 4 aspek perubahan kebijakan luar negeri, pada aspek *International Orientation Change* dimana perubahan pada kebijakan sudah bersifat ekstrem dan ber orientasi pada politik Internasional. Hal ini yang terjadi pada Amerika Serikat saat berganti kepemimpinan dari Donald Trump ke Joe Biden, dimana kebijakan luar negeri terkait migran pada masa kepemimpinan Donald Trump yang menerapkan pembatasan skala besar terhadap migran yang melewati kawasan El Paso. Namun, saat pergantian kepemimpinan kepada Joe Biden, kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait migran justru menjadi terbuka bagi para pendatang yang berasal dari Mexico dan negara lain yang berusaha melintas. Perubahan kebijakan luar negeri yang terbilang ekstrem ini yang menimbulkan dampak bagi Amerika Serikat sendiri dan negara-negara bagiannya. Dampak dari perubahan kebijakan luar negeri ini dapat timbul dari aspek peran global dan isu keamanan internasional.

1.7 Argumen Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran sebelumnya dari konsep *Foreign Policy Change* yang dijelaskan pada aspek *International Orientation Change*, bahwa sebuah kebijakan luar negeri sudah mengalami perubahan orientasi yang serius. Penulis berargumen bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait migran pada kepemimpinan Donald Trump mengalami perubahan cukup signifikan yang akan menimbulkan dampak bukan hanya bagi ekonomi dan sosial politik, namun juga pada stabilitas keamanan nasional dan pada aspek global. Permasalahannya, wacana dan implementasi kebijakan luar negeri sedari Trump menjabat hingga selesai banyak menimbulkan kontroversi pro dan kontra. Perubahan ini tak mungkin luput dari dampak secara domestik dan internasional, terlebih pada stabilitas keamanan Amerika Serikat yang merupakan negara adikuasa. Dampak domestik sudah dapat dilihat dari tingginya angka penduduk di Amerika Serikat dan tingginya angka pengangguran dan tuna wisma. Dampak ini tentu akan meluas ke berbagai aspek melihat kebijakan luar negeri dari perubahan yang masih berjalan hingga sekarang.

1.8 Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut John W. Creswell (2010), penelitian kualitatif adalah suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik yang terbentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar belakang alamiah. Pada penelitian ini penulis mencoba menguraikan kebijakan luar negeri

khususnya terkait migran ilegal di Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump dengan studi kasus wilayah El Paso.

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deksriptif. Pada penelitian ini penulis berusaha menguraikan mengenai dampak dari kebijakan luar negeri yang mempengaruhi stabilitas keamanan di Amerika Serikat, dimana pada masa kepemimpinan Donald Trump terdapat kebijakan yang baru dari masa sebelumnya..

1.8.2 Situs Penelitian

Penulis mengumpulkan data-data dan informasi yang digunakan secara sekunder. Data sekunder yang didapatkan melalui pencarian referensi seperti buku, artikel berita, jurnal, situs resmi, dan sumber lainnya.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang terdapat dalam kasus ini adalah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Trump sebagai subjek yang menetapkan kebijakan luar negeri terkait migran di Amerika Serikat, dimana menjadi fokus topik pada penelitian ini. Kebijakan luar negeri terkait migran yang menimbulkan berbagai dampak signifikan terhadap negara ini yang menjadi permasalahan yang akan penulis bahas pada penelitian ini.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dan akan digunakan dalam penelitian ini berupa data data-data tertulis tentang studi kasus yang penulis angkat, seperti jurnal akademik, artikel berita, dan buku-buku.

1.8.5 Sumber Data

Data yang didapatkan untuk menuliskan penelitian ini berupa data sekunder, karena penulis beracu pada penelitian terdahulu, jurnal akademik, artikel berita, dan buku.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dan akan digunakan pada penelitian ini yaitu studi literatur. Studi literatur yang penulis dapat yaitu dengan mengumpulkan dokumen tertulis seperti buku, jurnal, dan artikel berita yang terkait dengan topik penelitian ini. Studi literatur ini bertujuan untuk menemukan data dan teori yang relevan untuk penulisan penelitian ini.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Dikarenakan penelitian ini bersifat kualitatif, teknik analisis data yang akan digunakan adalah cleansing data dan analisis argumen. Melalui proses mendeteksi dan memperbaiki data yang belum akurat, belum lengkap, dan belum konsisten.

1.8.8 Kualitas Data

Data-data yang telah digunakan dan akan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari jurnal akademik resmi, buku, dan artikel yang berasal dari situs resmi. Sehingga kredibilitas data penelitian ini dapat terjamin.